

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Politik Luar Negeri Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Amerika Serikat secara umum, yaitu melakukan proteksi terhadap wilayah dan warga negaranya sarta melakukan ekspansi nilai-nilai yang dianutnya (demokrasi, HAM, kapitalisme, kesejaterahan dan perdamaian dunia). Dalam sejarah perpolitikannya, Amerika mengalami suatu dinamika yang sangat menarik untuk dibahas. Politik Luar Negeri Amerika Serikat hingga saat ini, mempunyai suatu pola yang dinamis, dimana pada tiap-tiap periode pemerintahan Presiden mempunyai prioritas sendiri dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian kepentingan nasional dengan konteks internasional yang dihadapi. Lalu persepsi, sebagai pokok bahasan skripsi ini juga mempengaruhi dinamika perpolitikan di Amerika Serikat. Pada bab dua ini, penulis akan membahas mengenai sejarah serta dinamika politik luar negeri Amerika Serikat terhadap dunia secara umum.

A. Sejarah Politik Amerika Serikat

Amerika Serikat (*United State of America*) adalah negara Republik Konstitusional Federal yang terdiridari 50 Negara Bagian. saat ini menjadi satu-satunya negara adi kuasa di dunia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi segala aspek kehidupan di dunia terlebih dalam bidang politik dan ekonomi. Amerika Serikat mengesahkan deklarasi kemerdekaan pada 4 Juli 1776

(Johnston, 1905). Pada 25 Mei 1787 melalui Sidang Konstituante, Konstitusi Negara Amerika Serikat disahkan. Konstitusi ini berisi tujuan utama Amerika Serikat dalam menjamin hak negara bagian. Pada 1788, Kongres dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk, George Washinton ditunjuk sebagai presiden pertama Amerika Serikat.

Pembentukan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang demokrasi didasarkan pada Konstitusi 1787 yang diterapkan hingga saat ini. Isi konstitusi tersebut berupa ciri pemerintahan Amerika Serikat (Pamudji, 1983, pp. 82-85), yaitu 1) Amerika Serikat adalah Negara Republik Federal yang demokratis, 2) pembagian kekuasaan konstitusional antara Pemerintah Federal (Serikat dan Pemerintah 50 Negara Bagian, 3) ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan *check and balance system*, 4) pemerintahan oleh rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dinyatakan melalui pemilihan umum, 5) Negara bagian memiliki hak yang sama, sama derajat dan tidak boleh diberi hak-hak istimewa, 6) keadilan ditegakan badan yudikatif melalui *Supreme Court*, 7) suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut sistem bipartisan; *Democratic Party* dan *Republican Party*. Dalam perjalanannya, Amerika Serikat melakukan ratifikasi atas beberapa amandemen dalam Konstitusinya yang dikenal sebagai *Bill of Rights* yang disahkan pada tahun 1791 (The Bill of Rights: What Does it Say?, 2016).

Berbicara tentang perpolitikan Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari sejarah negara itu sendiri. Sejak awal berdiri hasrat Amerika untuk menguasai percaturan dunia sudah tersurat dalam *Manifest Destiny* yang secara langsung

menjadi akar dalam perpolitikan luar negeri Amerika Serikat hingga kini. *Manifest destiny* menuntun serta mempengaruhi para pembuat kebijakan di Amerika Serikat dalam menentukan sikap dan pandangan yang harus diambil untuk menentukan pola politik luar negeri Amerika dari masa ke masa.

Setiap kebijakan atau PLN yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat tidak terlepas dari aktor-aktor di dalamnya seperti, Presiden, Kongress, Departemen Luar Negeri, Media Massa dan Kelompok Kepentingan. Dalam menentukan sikap politik luar negerinya, Presiden menjadi aktor utama. Namun demikian, pada dasarnya Presiden tidak sepenuhnya mandiri dalam menjalankan politik luar negeri Amerika, Kongress setiap saat dapat menghentikan atau tidak menyetujui kebijakan jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Amerika (Cipto, 2003, p. 201). Sepanjang sejarahnya hubungan Presiden dan Kongress mengalami dinamika. Saat politik isolasionis dijalankan kekuasaan Presiden dalam menentukan politik luar negeri sangat dibatasi oleh Kongress. Namun, sepanjang Perang Dingin yang berlangsung antara tahun 1948 hingga 1990 kekuasaan Presiden Amerika dalam proses pembuatan politik luar negeri cenderung dominan. Hal ini dikarenakan konstruksi persepsi yang dibangun presiden Amerika terhadap ancaman Komunisme Uni Soviet yang berhasil menciptakan iklim anti-komunis di Amerika. Sehingga presiden mempunyai pengaruh sangat dominan atas Kongress dan Media kala itu. Era paska Perang Dingin, Presiden kembali kehilangan legitimasinya untuk mendominasi proses pembuatan kebijakan luar negeri, karena hilangnya alasan untuk memerangi Uni Soviet yang telah runtuh menjadi Rusia (Cipto, 2003, pp. 201-203).

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sama dengan Deplu pada umumnya sebagai badan birokrasi politik yang terdiri dari wakil-wakil negara (diplomat) yang berada di seleuruh kantor perwakilan Amerika Serikat di dunia. Deplu memberikan akses informasi kepada presiden sebagai bahan pertimbangan pembuatan putusan dan menyebarkan nilai-nilai Amerika Serikat ke seluruh dunia.

Media massa dan kelompok kepentingan dapat memengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat. Media berfungsi memperlancar proses pembuatan dan pelaksanaan PLN, sebagai penggalang dukungan dan sumber legitimasi Presiden dalam menjalankan PLN (Cipto, 2003, p. 215). Sedangkan keterlibatan kelompok kepentingan dalam PLN Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan, karena kelompok kepentingan mempunyai sumber dana dan dukungan suara (*vote*) baik bagi anggota Kongres maupun Presiden, sehingga tidak mungkin bagi pembuat kebijakan untuk mengabaikan kelompok-kelompok kepentingan.

B. Dinamika Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik luar negeri Amerika Serikat seperti pada politik luar negeri pada umumnya yang bertujuan untuk meraih kepentingan nasional. Politik luar negeri Amerika Serikat selalu mengalami dinamika, hal ini dikarenakan pengaruh faktor-faktor penentu perubahan seperti faktor domestik dan internasional yang dihadapi. PLN Amerika adalah subjek yang selalu berubah dan dievaluasi untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada masa lalu untuk memprediksi dan mempelajari apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Ada empat poin utama yang mendasari PLN

Amerika Serikat: Pertama, *outward looking*, maksudnya adalah kebijakan dibuat untuk melihat peluang dan tantangan yang berada diluar batas negara Amerika. Kedua, PLN adalah tentang pilihan, pembuat putusan mempunyai pilihan-pilihan terbuka atas kebijakannya. Ketiga, PLN selalu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan domestic. Keempat, PLN Amerika Serikat dipengaruhi oleh masa lalu (Hastedt, 2004, p. vii). Pada intinya PLN selalu mengalami perubahan dikarenakan persepsi dalam hubungan internasional sering mengalami anomali.

Amerika Serikat sudah menjadi aktor lawas dalam politik internasional. Maka dari itu, perubahan pola PLN Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya dapat dengan jelas diamati. Perubahan dinamika PLN Amerika Serikat dapat dibagi menjadi beberapa karakteristik berdasarkan periode waktu, yaitu ekspansionisme, isolasionisme dan netralisme, intervensionisme dan internasionalisme, uniteralisme dan moralisme dan realisme.

1. Ekspansionisme

Ekspansionisme merupakan karakteristik politik luar negeri di abad ke-18, abad pertama kemerdekaan Amerika Serikat. Ekspansionisme adalah proses akuisisi wilayah negara lain oleh Amerika Serikat melalui pembelian wilayah ataupun perang. Pada tahun 1840-an pemimpin Amerika mempunyai keyakinan *manifest destiny* yang menjadi akar dari ekspansionisme Amerika Serikat. Mereka meyakini bahwa bangsa harus mencapai *natural frontier*, yaitu upaya merambah ke Laut Pasifik.

In the 1840s Americans felts that the United States was destined to reach our natural frontier- the Pacific Ocean. This belief called 'manifest destiny'. (Abington, 1961:142, dalam Minderop, 2006:38)

Ekspansionisme bertujuan untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat dalam bidang ideologi, politik dan ekonomi di wilayah Amerika-pasifik. Pada praktiknya Amerika berhasil memlakukan perluasan wilayah yang meliputi wilayah Alaska yang dibeli dari Rusia pada tahun 1867 dan menduduki 40% wilayah Meksiko serta pembelian wilayah-wilayah yang berada di Amerika itu sendiri seperti Louisiana, Texas, Florida, dll (Minderop, 2006, pp. 40-46). Dengan menggunakan bahasa, agama dan budaya Amerika melakukan ekspansi keseluruhan benua Amerika Serikat yang didasarkan pada konsep *manifest destiny*.

2. Isolasionisme dan Netralisme

Istilah isolasionisme merujuk pada prinsip dan kebijakan Amerika Serikat untuk menghindari serta menutup diri dari segala komitmen politik dan militer dengan negara lain terutama negara-negara di wilayah Eropa (DeConde, Burns, & Logevall, 2002, p. 337). Sedangkan netralisme adalah sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang tidak ingin terlibat dalam perang; terlebih ikut terlibat dalam Perang Dunia (DeConde, Burns, & Logevall, 2002, pp. 543-544). Politik isolasionis merupakan pilihan para pengambil keputusan di Amerika sepanjang abad ke-18 hingga awal abad ke-20 (Cipto, 2003, p. 195).

It is our true policy to steer clear of permanent alliances with any portion of the foreign world... Europe has a set of primary interests, which to us have none; or a very remote relation. Hence, she must be engaged in frequent controversies, the causes of which are essentially

foreign to our concerns... (President George Washington's Farewell Address, 1976)

Isolasionisme Amerika Serikat sudah terlihat sejak tahun 1796 hingga abad ke-19. Presiden George Washington dalam *Farewell Address* mengatakan bahwa Amerika harus menghindari aliansi permanen dengan dunia luar dan menegaskan bahwa Eropa tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Amerika, sehingga Amerika tidak perlu terlibat dalam urusan negara lain yang pada dasarnya tidak memuat hal-hal yang dapat melancarkan perwujudan kepentingan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu bukanlah suatu hal yang bijak untuk melibatkan diri dalam suatu ikatan aliansi dengan Eropa.

Pada tahun 1823 Presiden Monroe ikut mendukung adanya politik isolasi dan netralisme dengan menyuarakan Doktrin Monroe. Doktrin Monroe berisi sikap Amerika Serikat yang netral, tidak akan ikut campur dalam konflik politik yang terjadi di Eropa, lalu sebagai timbal baliknya Eropa dilarang untuk ikut campur dalam pemerintahan Amerika. Meskipun begitu pada tahun 1890 dan 1917 Amerika Serikat terlibat dalam perang. Di tahun 1890 Amerika Serikat melakukan intervensi ke negara Amerika Latin seperti Puerto Rico dan Kuba, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin. Lalu, tahun 1917 sedikit terlibat dalam Perang Dunia I karena adanya serangan dari Jerman, dimana Jerman menganggap Amerika Serikat tidak netral dalam melakukan kerjasama dagang. Terlepas dari semua Amerika Serikat kembali melakukan isolasionisme dengan menolak masuk ke dalam Liga Bangsa-Bangsa

(DeConde, Burns, & Logevall, 2002, pp. 345-347). Meskipun menolak untuk berkomitmen dalam LBB, Amerika mempunyai caranya sendiri untuk terlibat dalam urusan luar negeri. Pada Agustus 1928, 15 Negara termasuk Amerika Serikat meratifikasi *Kellog-Briand Pact*. Pakta ini menyatakan larangan perang dan sekaligus menunjukkan sikap Amerika Serikat untuk menjaga dan menciptakan perdamaian internasional (The Kellogg-Briand Pact, 1928). Politik Isolasi memasuki babak baru setelah terjadi depresi ekonomi 1929. Pada tahun-tahun ini Amerika Serikat hanya berfokus pada masalah perbaikan ekonomi nasionalnya dan mengabaikan dunia luar. Saat Amerika terfokus kepada urusan dalam negerinya kekuatan fasis di Eropa dan Asia bergerak untuk memulai Perang Dunia II.

3. Intervensionisme dan Internasionalisme

Ditengah politik isolasionisnya, Amerika Serikat pada tahun 1890 – 1917 sempat melakukan politik intervensi ke negara-negara Amerika Latin dan bekas jajahan Spanyol seperti Puerto Rico, Kuba dan Filipina. Kuba menjadi focus perhatian dikarenakan Spanyol menjajah Kuba pada waktu itu. Sehingga, Amerika Serikat seakan merasa bertanggung jawab atas Kuba dan membantu Kuba dalam membebaskan diri dari penjajahan. Namun setelah kepentingan atas teritori itu selesai Amerika Serikat kembali menutup diri dan melakukan kembali politik isolasi.

Intervensionisme dan internasionalisme sendiri sebenarnya sama yaitu politik dimana Amerika Serikat mulai muncul berperan aktif dalam dunia internasional serta melakukan intervensi langsung kepada negara lain.

Sebagai kebijakan luar negeri intervensionisme dipandang sebagai antithesis dari isolasionisme, ini berarti Amerika Serikat melibatkan diri dalam komitmen politik melalui perjanjian internasional atau keanggotaannya dalam organisasi internasional (Kuehl & Ostrower, 2013).

Ketika dunia berperang dalam Perang Dunia II, politik isolasi Amerika Serikat berganti dengan kebijakan yang lebih mengarah ke intervensionisme. Pergeseran kebijakan luar negeri ini muncul akibat hubungan Eropa-Amerika dan ketakutan publik akan perang. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman melakukan invansi terhadap Polandia, yang menyebabkan Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam pidato rakyat Amerika 3 September 1939, Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan Amerika Serikat masih bersikap netral dan akan menjaga Amerika Serikat dari perang.

This Nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or his conscience.

(Franklin D. Roosevelt Radio Address 1939, 1939)

Perang di Eropa membagi masyarakat Amerika Serikat menjadi grup; grup non-intervensionis (netral) dan grup intervensionis. Dasar argument dari grup intervensi adalah ketakutan akan kekalahan Inggris-Prancis yang membuat Jerman melakukan invansi yang akan berbahaya bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Benar saja, tahun 1940 Prancis dikalahkan oleh Jerman dan Inggris merupakan satu-satunya benteng

demokrasi antara Amerika dan Jerman. Survei nasional menunjukkan bahwa pada tahun tersebut 67% masyarakat Amerika Serikat percaya kemenangan Jerman akan membahayakan posisi Amerika Serikat (The History of American Foreign Policy Interventionism, 2016). Hal ini menyebabkan terkikisnya ideologi Amerika Serikat yang pada akhirnya menuntun Amerika pada kebijakan politik intervensionisme dan melibatkan dirinya pada Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II, bagi Amerika Serikat politik intervensi adalah tindak lanjut atas kesuksesannya yang keluar sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Tujuan utama politik intervensi pada tahap ini adalah untuk mencegah penyebaran ideologi lain yang tidak sesuai dengan ideologi demokrasi. Hal ini dikarenakan tersisanya dua kekuatan besar pemenang Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Untuk membentuk dan menyebarkan demokrasi, Amerika Serikat mengantisipasi penyebaran komunisme yang dibawa oleh Uni Soviet. Setelah itu *containment policy* muncul, ini menandakan usaha Amerika untuk membendung penyebaran komunisme.

Intervensi dilakukan berdasarkan Doktrin Truman yang digagas oleh Presiden Harry S. Truman pada 12 Maret 1946. Doktrin ini mendeskripsikan bahwa Amerika Serikat akan menyediakan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terkena dampak perang atau sedang dalam bahaya, akan diambil alih, oleh rezim komunis Uni Soviet, terutama Turki dan Yunani (Durante, 2010, p. 80). Kebijakan ini didasarkan pada perhitungan bahwa jika kedua

negara ini jatuh ketangan Soviet maka Soviet akan mempunyai peluang lebih besar untuk menguasai ladang-ladang minyak di Timur Tengah (Cipto, 2003, p. 198). Disamping itu, Amerika Serikat juga mengembangkan program *Marshall Plan* sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus politik pencegahan komunis di negara-negara Eropa dengan memberikan bantuan ekonomi untuk memulihkan kembali negara-negara Eropa yang hancur akibat dari Perang Dunia II. Selain itu Amerika juga berperan aktif dalam PBB, NATO dan melakukan kudeta di Amerika Latin dan Timur Tengah bersama CIA. Amerika Serikat sebagai pemanang Perang Dunia II muncul negara *super power* dalam bidang ekonomi dan militer berusaha mempertanggungjawabkan tindakannya dalam perang dan menjaga perdamaian, hal ini juga dilakukan dalam rangka mempertahankan pengaruhnya di dunia. Dalam pidatonya di Kongres pada bulan Maret 1947, Presiden Truman menyatakan, " *There is no other country (than the United States) to which democratic greece can turn.*" (Durante, 2010, p. 81). Penerapan Doktrin Truman pasca Perang Dunia II menandakan dimulainya Perang Dingin antara dua negara *super power* dunia. Doktrin Truman menjadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat hingga berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet.

4. Unilateralisme

Unilateralisme sendiri merupakan doktrin yang mendukung tindakan sepihak. Unilateralisme Amerika Serikat menjadi karakteristik politik luar negeri Amerika yang sangat ambisius paska Perang Dingin.

Runtuhnya Uni Soviet menjadikan faktor pendorong utama Amerika Serikat sebagai satu satunya negara *super power* yang berdiri sendiri di Dunia. Ini menandai bahwa tidak ada lagi kekuatan besar yang menyamai kekuatan dari Amerika Serikat, sehingga Amerika mempunyai klaim dan *privilege* untuk melakukan unilateralisme (Liu, 2006). Francis Fukuyama dalam *The End of History and the Last Man* (1992) mengatakan, sejarah telah berakhir, manusia tidak mempunyai pilihan selain mengikuti sistem politik dan kebijakan Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat menunjukkan tekad menguasai dunia atas dasar unilateralisme.

Pola politik luar negeri yang tergambar jelas dalam uniteralisme ini adalah politik standar ganda Amerika Serikat. Standar ganda adalah situasi ketidakconsistenan kebijakan luar negeri, dimana Amerika Serikat memperlakukan dua atau beberapa negara dengan cara yang berbeda. Artinya satu pihak menerima perlakuan positif dari Amerika Serikat sedangkan lainnya mengalami perlakuan yang tidak adil. Standar ganda selalu digunakan Amerika Serikat dalam isi-isu demokrasi dan perlindungan HAM, disatu sisi Amerika Serikat muncul sebagai pahlawan demokrasi dengan menjunjung tinggi HAM sementara disisi lain bertindak otoriter dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kebijakan politik standar ganda terlihat pada tahun 2003, Amerika Serikat melakukan serangan menggunakan senjata-senjata *unconventional* ke Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Husein dimana Amerika Serikat beralasan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah masak yang dapat

menjadi ancaman global. Dalam prosesnya tindakan Amerika Serikat menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil yang bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional, padahal disisi lain Amerika sangat menekan perlindungan HAM. Contoh lainnya adalah hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara monarki yang jauh dari kata demokrasi, namun Amerika Serikat sebagai negara kampiun dan pengawal demokrasi tidak mendorong demokratisasi di Arab Saudi, namun justru membela eksistensi penguasa Arab Saudi yang otoriter (Jatmika, 2000, p. 149). Dalam kasus Kuba, politik unilateralisme dilakukan Amerikas Serikat dengan sepihak memberikan sanksi embargo perdagangan dan melarang negara-negara aliansi untuk berhubungan dagang dengan Kuba.

Tokoh utama dalam mengembangkan doktrin unilateralisme adalah tokoh dari kelompok neo-konserfatif yaitu, Presiden George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld dan Paul Wolfwitz (Suryohadipuro, 2004). Sikap unilateral Amerika Serikat ditunjukkan ketika dengan sepihak menarik diri dari ABM (*Anti Ballistic Missile*) *Treaty*, menolak *Kyoto Protocol* dan melakukan invasi militer ke Irak secara sepihak tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB (Liu, 2006).

5. Moralisme dan Realisme

Moralisme dan realisme adalah sebuah sisi lain dari sistem perpolitikan Amerika Serikat. Politik luar negeri Amerika Serikat sering disebut dengan politik yang tidak tentu arahnya antara politik moralis dan riil. Dalam menjalankan politik moralismenya Amerika Serikat kembali ke dalam

origin of the USA yang berisi nilai-nilai dasar negara AS; Amerika sebagai rumah bagi semua masyarakat, Amerika sebagai model dari demokrasi, Amerika sebagai suatu superioritas moral. Amerika Serikat berusaha menunjukkan sisi moralisnya yang bertanggung jawab atas kebijakannya dan terhadap negara lain. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan menjaga perdamaian dunia melalui demokrasi, *economic revival* dalam kebijakan *Marshall Plan*, kebijakan *humanitarian concern*, dll.

Namun, disatu sisi Amerika Serikat sangat agresif dan cenderung menghalalkan segala cara dalam rangka melindungi dan mencapai kepentingan luar negerinya. Ini tercermin dari kebijakan Amerika dalam rangka *War on Terrorism* dimana Amerika Serikat bertindak sendiri dalam invansi ke Afghanistan dan Irak. Esensi dari realisme ini adalah kepentingan nasional yang terkait dengan keamanan nasional (Hastedt, 1997, pp. 28-34).

Dari penjelasan diatas, Politik luar negeri Amerika Serikat sama seperti d PLN lainnya, yaitu untuk mencapai kepentingan nasional. PLN AS yang terbentuk sejak awal hingga saat ini selalu berganti-ganti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Amerika Serikat. Politik luar negeri Amerika Serikat yang sangat dinamis ini juga sangat dipengaruhi perubahan yang ada didalam maupun luar negeri. PLN yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat dibedakan menjadi 6 karakteristik, yaitu ekspansionisme, isolasionisme dan netralisme, intervensionisme dan internasionalisme, unilateralisme serta moralisme dan realisme.

Beberapa wilayah dijadikan fokus pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat, seperti Amerika Latin. Salah satu negara di Amerika Latin yang menarik

perhatian Amerika Serikat adalah Kuba. Kuba menarik Amerika Serikat untuk melakukan intervensi dikarenakan banyak faktor *plus* yang dimiliki Kuba, seperti kekayaan alam dan lokasi yang strategis. Intervensi Amerika Serikat ke Kuba dimulai ketika AS berusaha membantu Kuba dalam melepaskan diri dari kolonisasi Spanyol. Sejak saat itu AS menjalin hubungan baik dan menaruh dasar pondasi PLN terhadap Kuba. Hubungan AS dengan Kuba sejak awal berhubungan hingga saat ini beserta dinamikanya akan dijelaskan didalam pembahasan bab selanjutnya.